



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 106 /B.07/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/437/B.09/HK/2018, tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NONOR : G/ 166 /B.07/2021
TANGGAL: 4-2-2021

**REKAPITULASI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	1,25	1	0	A		
2	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	1,307	1	0	A	1,7949	A
3	- KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1,495	1	0	A		
4	- Analis Tata Usaha	2	2,658	3	-1	A		
5	- Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	3,215	3	-2	A		
6	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	2,124	2	-2	A		
7	- Sekretaris	0	1,565	2	-2	A		
8	- Pengadministrasi Kepegawaian	1	3,32	3	-2	A		
9	- Pengadministrasi Umum	4	3,616	4	0	A		
10	- Pengemudi	1	1	1	0	A		
11	- KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	1	1,041	1	0	A		
12	- Analis Keuangan	3	2,813	3	0	A		
13	- Penyusun Laporan Keuangan	2	1,854	2	0	A		
14	- Verifikator Keuangan	0	2,357	2	-2	A		
15	- Pengadministrasi Keuangan	1	1,848	2	-1	A		
16	- Pengadministrasi Pajak	1	1,552	2	-1	A		
17	- Bendahara	0	1,161	1	-1	A		
18	- KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM	1	1,146	1	0	A		
19	- Analis Perencanaan	2	2,765	3	-1	A		
20	- Pengelola Bahan Perencanaan	0	1,178	1	-1	A		
21	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1,572	2	-2	A		
22	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGOLAHAN DATA PENANAMAN MODAL	1	1,162	1	0	A	1,7442	A
23	- KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	1	1,166	1	0	A		
24	- Analis Perencanaan Strategis	3	2,563	3	0	A		
25	- Penyusun Rencana Investasi	2	1,791	2	0	A		
26	- Pengadministrasi Umum	1	1,512	2	-1	A		
27	- KEPALA SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL	1	1,02	1	0	A		
28	- Analis Peraturan Investasi	1	3,173	3	-2	A		
29	- Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi	1	1,791	2	-1	A		
30	- Pengolah Data Peraturan Investasi	0	1,231	1	-1	A		
31	- KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	1	1,107	1	0	A		
32	- Analis Kelembagaan Usaha	2	3,173	3	-1	A		
33	- Analis Iklim Usaha dan Kerjasama	1	2,969	3	-2	A		
34	- Pengelola Program Dunia Usaha	0	1,248	1	-1	A		
35	- KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	1,236	1	0	A	1,5032	A
36	- KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	1,124	1	0	A		
37	- Analis Pengembangan Potensi Daerah	1	3,173	3	-2	A		
38	- Pengelola Data Pengembangan Investasi	1	1,115	1	0	A		
39	- Pengadministrasi Umum	0	1,6	2	-2	A		
40	- KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	1,229	1	0	A		
41	- Analis Promosi dan Kerjasama Luar Negeri	2	2,674	3	-1	A		
42	- Perancang Promosi	0	1,457	1	-1	A		
43	- Penyusun Rencana Promosi	0	1,654	2	-2	A		
44	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	1,157	1	0	A		
45	- Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi	1	3,123	3	-2	A		
46	- Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	0	1,076	1	-1	A		
47	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	1,6	2	0	A		
48	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	0	1,162	1	-1	A	1,4921	A
49	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	1,012	1	0	A		
50	- Pengawas Penanaman Modal	2	2,808	3	-1	A		
51	- Pengelola Pemantauan	1	1,359	1	0	A		
52	- Pengelola Pengawasan	1	1,242	1	0	A		
53	- KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	1,171	1	0	A		
54	- Analis Pembinaan Kelembagaan Investasi	2	2,727	3	-1	A		
55	- Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	0	1,163	1	-1	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	- Pengadministrasi Umum	2	1,584	2	0	A		
57	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	1,27	1	0	A		
58	- Analis Penanaman Modal	2	2,52	3	-1	A		
59	- Analis Sistem Informasi	0	2,74	3	-3	A		
60	- Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	1	1,202	1	0	A		
61	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A	1	1,295	1	0	A	1,8576	A
62	- KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I	1	1,094	1	0	A		
63	- Analis Dokumen Perizinan	3	2,839	3	0	A		
64	- Pengelola Dokumen Perizinan	0	1,608	2	-2	A		
65	- Pengadministrasi perizinan	1	1,59	2	-1	A		
66	- KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II	1	1,026	1	0	A		
67	- Analis Dokumen Perizinan	4	3,951	4	0	A		
68	- Pengelola Dokumen Perizinan	1	1,726	2	-1	A		
69	- Pengadministrasi perizinan	2	1,547	2	0	A		
70	- KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/III	1	1,03	1	0	A		
71	- Analis Dokumen Perizinan	2	3,224	3	-1	A		
72	- Pengelola Dokumen Perizinan	1	1,593	2	-1	A		
73	- Pengadministrasi perizinan	0	1,627	2	-2	A		
74	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B	1	1,145	1	0	A	1,6519	A
75	- KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/I	1	1,03	1	0	A		
76	- Analis Dokumen Perizinan	3	2,634	3	0	A		
77	- Pengelola Dokumen Perizinan	1	1,036	1	0	A		
78	- Pengadministrasi perizinan	1	1,684	2	-1	A		
79	- KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/II	1	1,03	1	0	A		
80	- Analis Dokumen Perizinan	2	3,224	3	-1	A		
81	- Pengelola Dokumen Perizinan	0	1,17	1	-1	A		
82	- Pengadministrasi perizinan	1	1,544	2	-1	A		
83	- KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/III	1	1,059	1	0	A		
84	- Analis Dokumen Perizinan	3	2,998	3	0	A		
85	- Pengelola Dokumen Perizinan	0	1,157	1	-1	A		
86	- Pengadministrasi perizinan	2	1,764	2	0	A		
87	KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	1	1,162	1	0	A	1,5639	A
88	- KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN	1	1,006	1	0	A		
89	- Analis Data dan Informasi	3	2,866	3	0	A		
90	- Analis Pengaduan Pemerintahan	1	2,766	3	-2	A		
91	- Pengolah Data Informasi dan Hukum	0	1,059	1	-1	A		
92	- KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN	1	1,068	1	0	A		
93	- Penyusun Bahan Kebijakan	1	1,654	2	-1	A		
94	- Penyusun Laporan Kebijakan	1	2,216	2	-1	A		
95	- Pengadministrasi Umum	0	1,056	1	-1	A		
96	- KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN	0	1,007	1	-1	A		
97	- Analis Pelayanan Publik	3	2,761	3	0	A		
98	- Analis Investasi Daerah	1	2,765	3	-2	A		
99	- Pengolah Data Pelayanan	0	1,033	1	-1	A		
100	- JF Analis Kebijakan Pertama	0	22,05	22	-22	A		
101	- JF Analis Kebijakan Muda	0	21,435	21	-21	A		
102	- JF Analis Kebijakan Madya	0	10,208	10	-10	A		
103	- JF Analis Kebijakan Utama	0	1,666	2	-2	A		
104	- JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Pelaksana/Terampil	0	0,312	0	0	E		
105	- JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	1,083	1	-1	A		
106	- JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	0	1,166	1	-1	A		
107	- JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	0	2,187	2	-2	A		
108	- JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	0	2,351	2	-2	A		
109	- JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	0	2,37	2	-2	A		
110	- JF Arsiparis Pelaksana/Terampil	0	0,279	0	0	E		
111	- JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	1,633	2	-2	A		
112	- JF Arsiparis Penyelia	0	1,853	2	-2	A		
113	- JF Arsiparis Pertama	0	1,999	2	-2	A		
114	- JF Arsiparis Muda	0	1,707	2	-2	A		
115	- JF Arsiparis Madya	0	0,474	0	0	E		
116	- JF Arsiparis Utama	0	0,154	0	0	E		
117	- JF Penata Laksana Barang Pelaksana/Terampil	0	2,353	2	-2	A		
118	- JF Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	1,42	1	-1	A		
119	- JF Penata Laksana Barang Penyelia	0	1,958	2	-2	A		

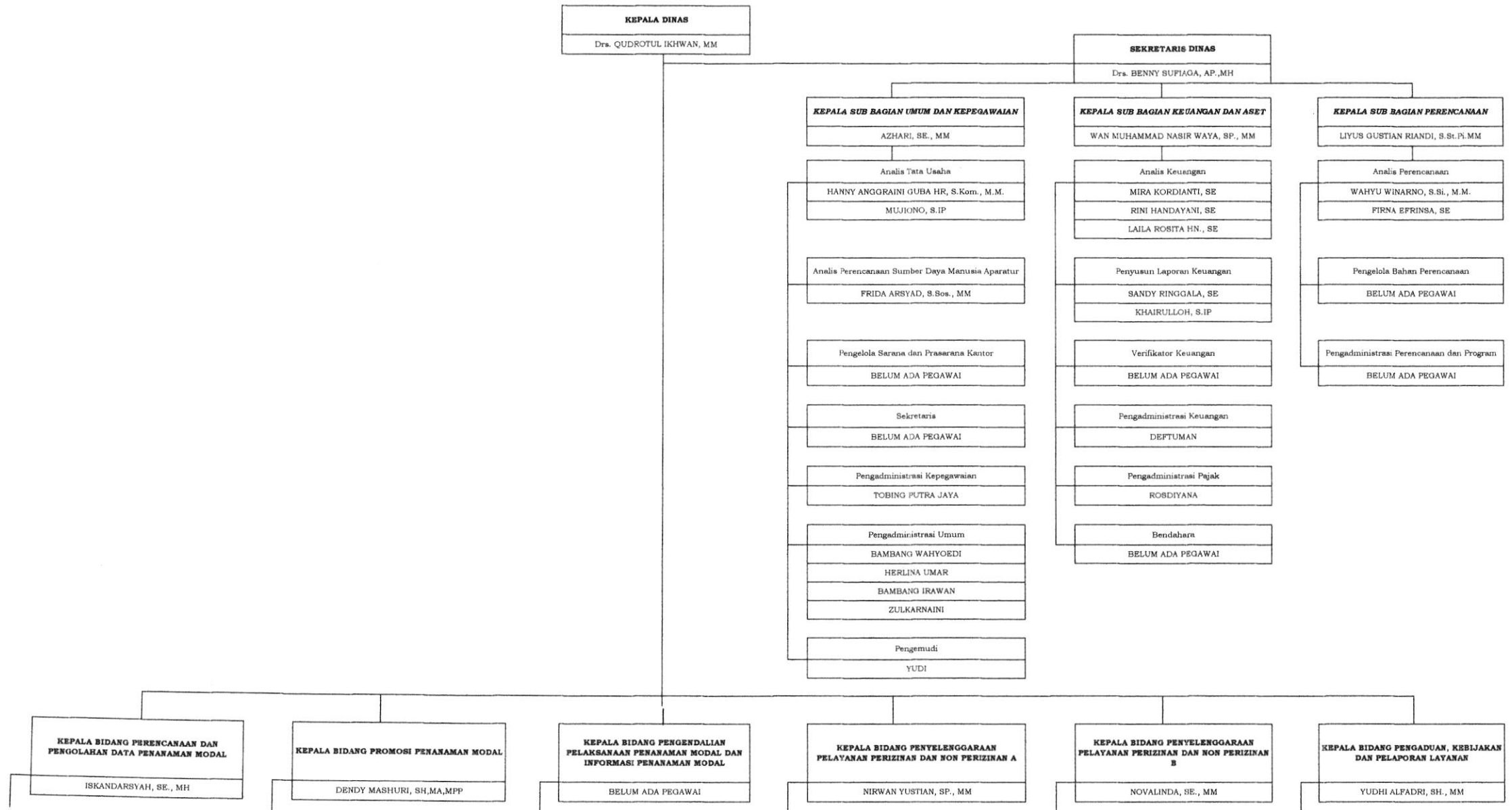
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	- JF Perencana Pertama	0	2,407	2	-2	A		
121	- JF Perencana Muda	0	4,186	4	-4	A		
122	- JF Perencana Madya	0	2,167	2	-2	A		
123	- JF Perencana Utama	0	0,446	0	0	E		
124	- JF Pranata Komputer Pemula	0	0,014	0	0	E		
125	- JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	0	1,812	2	-2	A		
126	- JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	0	4,667	5	-5	A		
127	- JF Pranata Komputer Penyelia	0	5,417	5	-5	A		
128	- JF Pranata Komputer Pertama	0	2,791	3	-3	A		
129	- JF Pranata Komputer Muda	0	3,29	3	-3	A		
130	- JF Pranata Komputer Madya	0	1,566	2	-2	A		
131	- JF Pranata Komputer Utama	0	0,487	0	0	E		
	Jumlah	111	284.873	284	-173		2,08	A

GUBERNUR LAMPUNG,



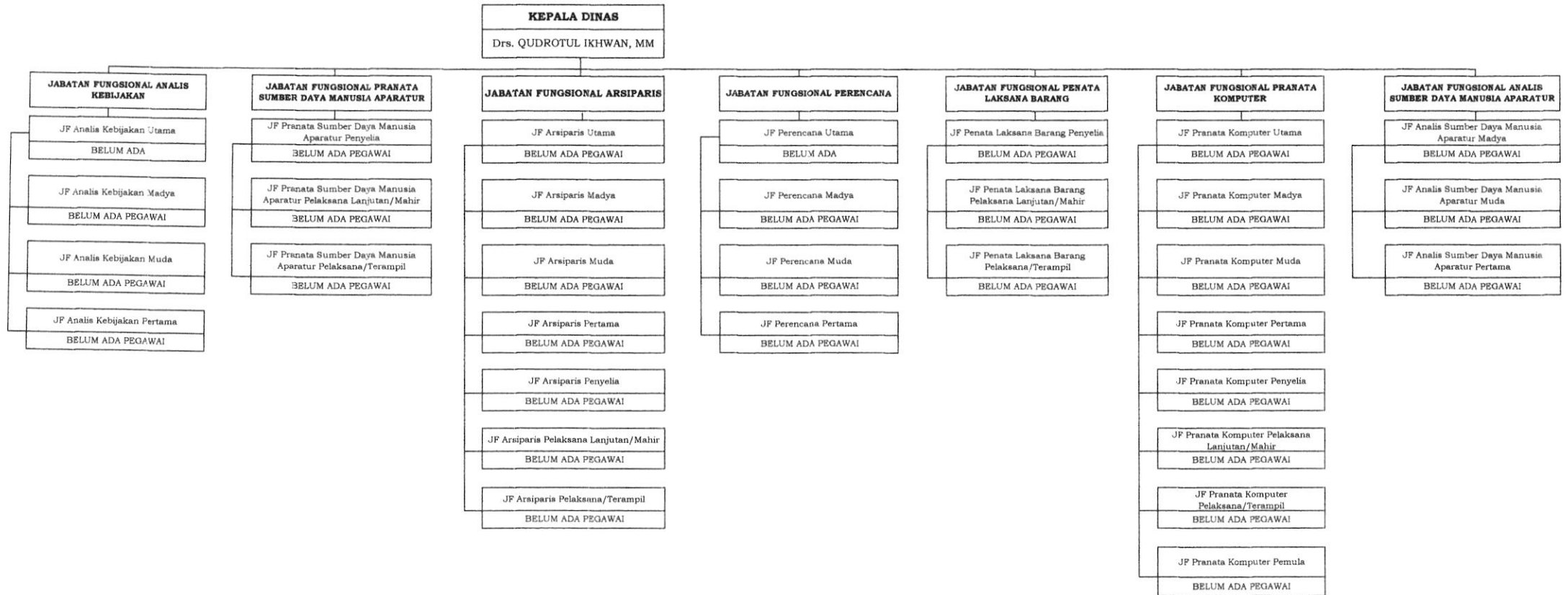
ARINAL DJUNAIDI

2.1 PETA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG



KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	TOMMI EFFENDI P. SIHALOHO, S.P., M.M.	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	NAZARUDDIN LATIF, SE., MM	KEPALA SEKSI PENANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	FIRMAN ZUBAIDI, S.Sos., MM	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A I	YAN THOHR, SH., MM	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I	EMILIA T., S.Sos., MM	KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN	ISABELLA YOSEPHINE, S.Sos., M.M
	Analisa Perencanaan Strategis IVON NILAWATI, SE., ME INDRA SYAFRIL, SH Drs. TOTOK SULISTYO, MM		Analisa Pengembangan Potensi Daerah DIARA SANTIANA, SH		Pengawas Penanaman Modal RADEN PANJI, S.Sos DEWI SARASWATE, SE		Analisa Dokumen Perizinan FERDINAL, SE SANDORI KARTINI, SE PAHMI PASHA ISKANDAR, S.H., MM		Analisa Dokumen Perizinan Hj. MASHFAH, SE LISMIN SAHRI, S.IP YULISMINARTI, SE		Analisa Data dan Informasi MAHENDSA, S.H., M.M DARMA SETIAWAN, S.H. SUNIWATI, SE
KEPALA SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL	Penyusunan Rencana Investasi AHMAD RIYADI, SE ANGGI CYNTHIA DEWI, SH., MH	KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pengelola Data Pengembangan Investasi ROSDIANA, S.Sos., MM	Pengelola Pemantauan MULI NADYARAYA ASTUTI, S.E., MM	Pengelola Pemantauan EDWIN, S.IP	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A II	DESY CHAIRANI, SE., MM	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II	SUSI FITRI UTAMI, SH., MH	Pengolah Data Informasi dan Hukum BELUM ADA PEGAWAI	Analisa Pengaduan Peministrasian NETI HEHAWATI, SAN
	Pengadministrasian Umum M. HUPRON		Pengadministrasian Umum BELUM ADA PEGAWAI		Pengelola Pengembangan EDWIN, S.IP		Analisa Dokumen Perizinan MULYANI, SAN METTY RUTHNA SARI, S.H. DEDI NOYAN, ST EDI EFFENDI, S.H., M.SE		Analisa Dokumen Perizinan SILVIA WIDYASTUTI, SE., M.Kes MUHAMMAD ADISA, S.STP		Penyusunan Bahan Kebijakan EVA ROLITA, S.E., M.M
KEPALA SEKSI PEMERDAYAAN USAHA	Analisa Peraturan Investasi ERNAWATI, S.IP	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL	Analisa Promosi dan Kerjasama Luar Negeri RENI OKTAVIANI, SE DERI AZNELIA AGUNG, SE., M.M.	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perencanaan BELUM ADA PEGAWAI	Analisa Pembinaan Kelembagaan Investasi MASDIANA, SE ALDHI SETYA FERNANDI, S.H., M.H	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B III	NUR QOMARAWATI, SH., MH	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN PENDINGKATAN LAYANAN	BELUM ADA PEGAWAI	Analisa Pelayanan Publik WAHYUNI BAYANGKARI NUR SAMAD, S.STP., M.M EVA SAFITRI, S.Hum MAKMUN, S.E., M.M	Analisa Investasi Daerah DEDI KURNIAWAN, SH
	Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi DR. ARIE FITRIA, S.IP, MT, DEA		Perancang Promosi BELUM ADA PEGAWAI		Pengelola Pengembangan BELUM ADA PEGAWAI		Analisa Dokumen Perizinan SALUSIARA, SE ENDAH PERMATA SARIE, S.E., M.M. TAUFIK HIDAYAT, S.Sos.		Analisa Dokumen Perizinan SRI WAHYUNINGBIH OFI METAFIA		Pengolah Data Pelayanan BELUM ADA PEGAWAI
KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	FIRMANSYAH, SE., MM	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL	ENALIA HERTA, SE., MM	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Drs. HELDAWATI	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A III	RIDHO WIRADINATA, S.IP., MM	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I	NUR QOMARAWATI, SH., MH	Analisa Investasi Daerah DEDI KURNIAWAN, SH	Analisa Pelayanan Publik WAHYUNI BAYANGKARI NUR SAMAD, S.STP., M.M EVA SAFITRI, S.Hum MAKMUN, S.E., M.M
	Analisa Kebutuhan Usaha ARYA REGINA, S.P., M.IP IDA MARYATI, S.Sos		Analisa Penyuluhan dan Layanan Informasi DINA OKTAFIANA KUSUMA, S.IP, M.Si.		Analisa Penanaman Modal SUCIANTO, SE SERLI FEBRINA, SE		Analisa Dokumen Perizinan PARTINI, S.Sos., M.H HESTIAN DWI PANGLIPUR, S.Pai		Analisa Dokumen Perizinan SRI WAHYUNINGBIH OFI METAFIA		Pengolah Data Pelayanan BELUM ADA PEGAWAI
KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	Analisa Iklim Usaha dan Kerjasama PAULZAH, S.IP.	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana BELUM ADA PEGAWAI	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Analisa Sistem Informasi BELUM ADA PEGAWAI	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A III	RIDHO WIRADINATA, S.IP., MM	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I	NUR QOMARAWATI, SH., MH	Analisa Investasi Daerah DEDI KURNIAWAN, SH	Analisa Pelayanan Publik WAHYUNI BAYANGKARI NUR SAMAD, S.STP., M.M EVA SAFITRI, S.Hum MAKMUN, S.E., M.M
	Pengelola Program Dunia Usaha BELUM ADA PEGAWAI		Pengadministrasian Sarana dan Prasarana MAYA NOVASARI JONI CHON		Analisa Sistem Informasi BELUM ADA PEGAWAI		Analisa Dokumen Perizinan PARTINI, S.Sos., M.H HESTIAN DWI PANGLIPUR, S.Pai		Analisa Dokumen Perizinan SRI WAHYUNINGBIH OFI METAFIA		Pengolah Data Pelayanan BELUM ADA PEGAWAI

**2.2 PETA JABATAN FUNSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

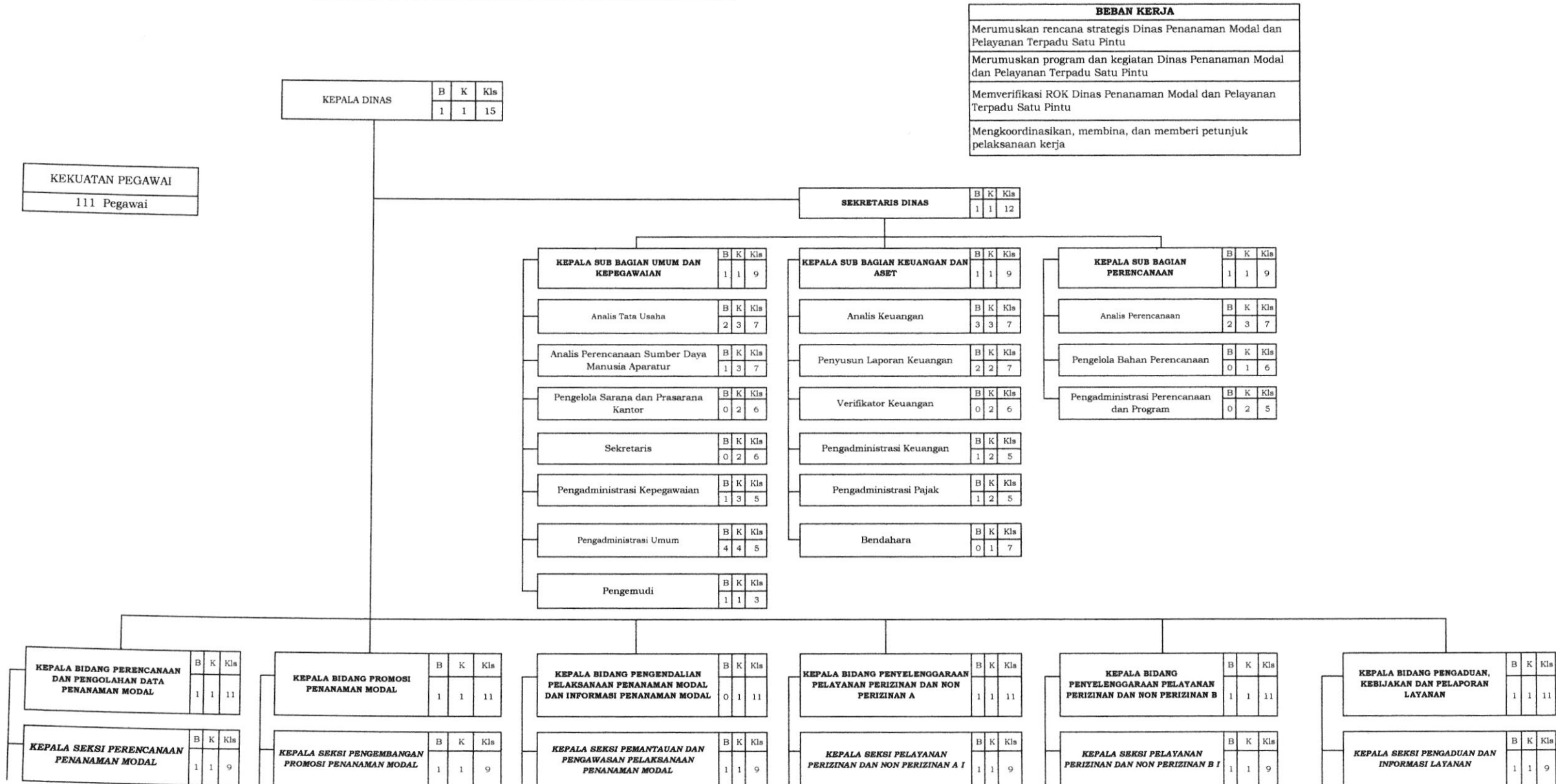


GUBERNUR LAMPUNG,



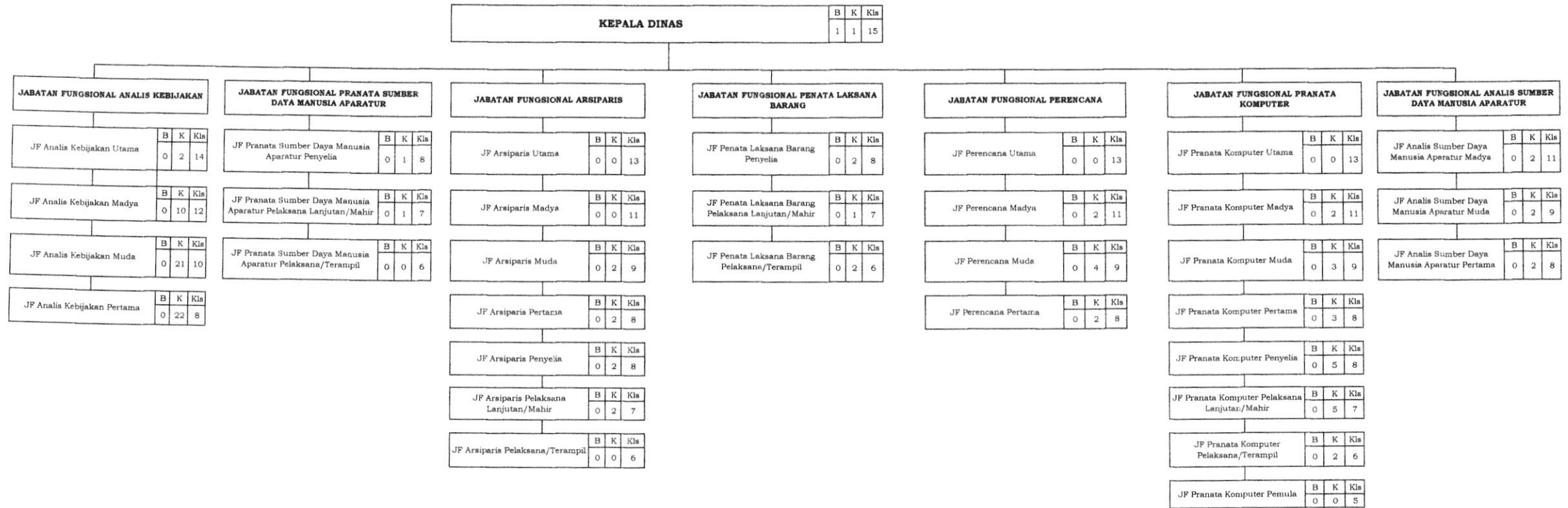
ARINAL DJUNAIDI

**3.1 PETA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**



Analisa Perencanaan Strategis	B 3	K 3	Kla 7
Penyusunan Rencana Investasi	B 2	K 2	Kla 7
Pengadministrasi Umum	B 1	K 2	Kla 5
KEPALA SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL	B 1	K 1	Kla 9
Analisa Peraturan Investasi	B 1	K 3	Kla 7
Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi	B 1	K 2	Kla 7
Pengolah Data Peraturan Investasi	B 0	K 1	Kla 6
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	B 1	K 1	Kla 9
Analisa Kelembagaan Usaha	B 2	K 3	Kla 7
Analisa Iklim Usaha dan Kerjasama	B 1	K 3	Kla 7
Pengelola Program Dunia Usaha	B 0	K 1	Kla 6
Analis Pengembangan Potensi Daerah	B 1	K 3	Kla 7
Pengelola Data Pengembangan Investasi	B 1	K 1	Kla 6
Pengadministrasi Umum	B 0	K 2	Kla 5
KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	B 1	K 1	Kla 9
Analisa Promosi dan Kerjasama Luar Negeri	B 2	K 3	Kla 7
Perancang Promosi	B 0	K 1	Kla 7
Penyusun Rencana Promosi	B 0	K 2	Kla 7
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL	B 1	K 1	Kla 9
Analisa Penyuluhan dan Layanan Informasi	B 1	K 3	Kla 7
Pengelola Pemasaran Sarana dan Prasarana	B 0	K 1	Kla 6
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	B 2	K 2	Kla 5
Pengawas Penanaman Modal	B 2	K 3	Kla 7
Pengelola Pemantauan	B 1	K 1	Kla 6
Pengelola Pengawasan	B 1	K 1	Kla 6
KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	B 1	K 1	Kla 9
Analisa Pembinaan Kelembagaan Investasi	B 2	K 3	Kla 7
Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perkonomian	B 0	K 1	Kla 6
Pengadministrasi Umum	B 2	K 2	Kla 5
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	B 1	K 1	Kla 9
Analisa Penanaman Modal	B 2	K 3	Kla 7
Analisa Sistem Informasi	B 0	K 3	Kla 7
Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	B 1	K 1	Kla 6
Analisis Data dan Informasi	B 3	K 3	Kla 7
Analisis Pengaduan Pemerintahan	B 1	K 1	Kla 6
Pengelola Dokumen Perizinan	B 3	K 3	Kla 7
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A II	B 1	K 1	Kla 9
Pengelola Dokumen Perizinan	B 0	K 2	Kla 6
Pengadministrasi Perizinan	B 1	K 2	Kla 5
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B II	B 1	K 1	Kla 9
Analisis Dokumen Perizinan	B 2	K 3	Kla 7
Pengelola Dokumen Perizinan	B 0	K 1	Kla 6
Pengadministrasi Perizinan	B 1	K 2	Kla 5
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B III	B 1	K 1	Kla 9
Pengelola Dokumen Perizinan	B 0	K 1	Kla 6
Pengadministrasi Perizinan	B 3	K 3	Kla 7
Analisa Investasi Daerah	B 1	K 3	Kla 7
Analisa Pelayanan Publik	B 3	K 3	Kla 7
Pengolah Data Pelayanan	B 0	K 1	Kla 6

**3.2 PETA JABATAN FUNSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI